

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan *agenda setting* dari kebijakan jemput bola meliputi beberapa hal. Pertama, belum adanya Petugas Registra secara definitif di Kelurahan. Kedua, belum tersedianya fasilitas pelayanan berupa meja pelayanan yang representatif dalam pelayanan Administrasi Kependudukan bagi petugas Registra di Kelurahan. Ketiga, belum tersusunnya SOP (*Standard Operating Procedure*) di bidang Pendaftaran Penduduk. Keempat, belum terbentuknya arsip digital untuk Akta-akta Pencatatan Sipil. manusia yang mengoperasikan secara digital. Kelima, belum meratanya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Keenam, belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan. Ketujuh, belum meratanya kemampuan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di bidang Administrasi kependudukan.

Dalam *agenda setting*, dari aspek *problem stream* permasalahan yang terjadi disebabkan oleh data kepemilikan dokumen kependudukan berupa kepemilikan akta masih dirasa jauh dari target selain itu aksesibilitas dan peran serta masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan menjadi salah satu permasalahan utamanya pada masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dari aspek *policy stream* kebijakan sudah dilaksanakan efektif ditandai dengan masuknya kebijakan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja daerah. Sedangkan dari aspek *political stream*, kebijakan yang telah diusulkan telah dibahas bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif sehingga dapat dijalankan walaupun ada pemangkasan anggaran dari pagu yang diusulkan. Dari ketiga aliran Kingdon, *policy stream* lah yang paling dominan terhadap disetujuinya agenda kebijakan yang diusulkan, karena dalam tahap ini lah eksekutif, legislatif dan stakeholder lainnya saling membawa kepentingan masing-masing agar rancangan programnya disetujui pada musrenbang. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah juga mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai jabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi dalam hal pelayanan program jemput bola yang berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan program jemput bola melalui penambahan jumlah petugas registra, baik di dinas maupun di kelurahan. Untuk petugas registra di dinas dapat merekrut petugas kontrak atau honorer agar mengurangi beban kerja yang berlebihan. Sedangkan di level kelurahan dapat merekrut satgas berupa sukarelawan, karangtaruna atau anggota PKK yang akan dijadikan petugas registra.

2. Demi meningkatkan performa pelayanan program jemput bola agar dapat mewujudkan visi Kemendagri tahun 2020, 90% kepemilikan akta kelahiran harus disertai peningkatan anggaran yang ada.
3. Sosialisasi secara masif melalui media online baik di website dinas maupun website pemerintah kota Yogyakarta serta sosialisasi secara langsung oleh aparatur sipil negara di level kelurahan maupun kecamatan tentang pentingnya akta kelahiran, baik melalui spanduk-spanduk atau melalui seminar langsung.
4. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus membuat database yang rinci untuk pengarsipan digital akta kelahiran, serta membuat website khusus untuk pengajuan dan verifikasi kepemilikan akta kelahiran secara online.

Saran peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah menekankan penelitian pada sektor implementasi dan evaluasi, mengetahui faktor kelemahan dari program secara mendalam dan komprehensif sehingga dapat menggambarkan isi kebijakan secara mendetail.